

KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PENGUATAN UMKM**Lusy¹⁾, Maria Widyastuti²⁾**¹Ekonomi, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: margaretha.hulda@ukdc.ac.id

²Ekonomi, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: maria.widyastuti@ukdc.ac.id

Abstract

BPRs play an important role in strengthening the MSME economy. When the MSME sector has difficulty dealing with capital, they need the role of BPR for their business continuity. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting observations and interviews with the BPR in Sidoarjo Regency and SMEs. The stages of research carried out include: (1) identifying the role of BPR; (2) conduct an in-depth analysis of the role of BPR in providing financial access to MSME actors; (3) conduct an analysis of BPR systems and procedures in providing financial access to MSME actors; (4) analyzing the service products offered by the BPR; and (5) reconstructing the various roles of BPRs to enhance the role of BPRs in improving the performance of MSMEs. The results of the study indicate that BPR plays a very important role in improving the performance of MSMEs. Even though it has played a role, in order to create business continuity, it is necessary to reconstruct the role of BPR in improving the performance of MSMEs, including: (1) Assistance to MSME actors related to innovation in the use of technology that can support the promotion of MSME products; (2) Assistance in the form of training related to strategies for creating different and distinctive products, in order to have a comparative advantage; (3) Assistance in the form of training related to customer service; and (4) capital building assistance in the form of management assistance and business supervision to customers.

Keywords : Rural Banks, Micro, Small and Medium Enterprises**JEL Clasification :** G21, L25, O15**1. PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia juga berdampak di Indonesia, karena memutus hampir semua mata rantai bisnis. Sampai saat ini memasuki tahun ke dua, sektor mikro dan usaha lain mulai menapakkan langkah menunjukkan tanda kebangkitan kembali. Adanya Pandemi Covid-19 ini membuat sektor mikro mengalami kesulitan mengatasi permodalan mereka. Diharapkan dengan adanya pembiayaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat membuat UMKM bangkit kembali serta mampu menyerap tenaga kerja yang sempat terputus hubungan kerja saat pandemi berkepanjangan. Ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998, UMKM tetap terbukti tahan uji menghadapi badai ekonomi tersebut. Data BPS

Indonesia mencatat penyerapan tenaga kerja di tahun 1997 ialah 57,4 juta (87,6%) perusahaan kecil, 7,7 juta (11,75%) perusahaan sedang, dan 0,0393 juta (0,61%) perusahaan besar. Sedangkan di tahun 1998 mencatat 57,34 juta (88,66%) perusahaan kecil, 6,9 juta (10,78%) perusahaan sedang dan 0,364 juta (0,56%) perusahaan besar. Oleh sebab itu lembaga keuangan mikro (BPR) seharusnya menjadi garda paling depan untuk mendampingi sektor UMKM, terutama memperkuat kinerjanya sehingga dapat membuka akses keuangan bagi sektor UMKM, diharapkan kebangkitan sektor UMKM mampu mengungkit aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warganya.

Obyek penelitian ini adalah pelaku lembaga keuangan mikro (BPR) dan UMKM yang ada di

Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi Kabupaten Sidoarjo karena merupakan kabupaten di Jawa Timur terbesar ke 3 dari segi Upah Minimum Kabupaten (UMK), di nomor 1 dan 2 ditempati oleh Surabaya dan Gresik. Selain itu Kabupaten Sidoarjo memiliki gelar sebagai kabupaten dengan UMKM terbaik. Banyak UMKM baru tumbuh dan terus berkembang di Kabupaten Sidoarjo dimana jumlahnya terus meningkat. Per April th 2018 tercatat 171.264 UMKM dan memiliki tenaga kerja sejumlah 306.481 orang. Di tahun 2018 tercatat di Sidoarjo mempunyai jumlah tenaga kerja sejumlah 1.094.650 dari total tenaga kerja Jawa Timur yang berjumlah 21.300.423. UMKM dalam ekonomi yang berkembang menjadi wadah yang memberikan lapangan kerja yang produktif (Valeriani and Putri, 2020). Meskipun jumlah UMKM di Sidoarjo saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan dari 51 (tahun 2019) menjadi 48 (tahun 2020). Jumlah penyaluran kredit UMKM yang diberikan oleh BPR juga mengalami penurunan dari 10.803.798 (tahun 2019) menjadi 10.336.236 (tahun 2020).

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa kinerja BPR terkait pemberian akses keuangan kepada sektor UMKM di Sidoarjo. Sedangkan target akhir yang dicapai adalah “Menjadikan BPR sebagai instrumen efektif untuk memperkuat kinerja sektor UMKM”. BPR seharusnya mampu memperkuat kinerja sektor UMKM menjadi lebih baik, namun sampai saat ini masih belum sesuai dengan realita yang ada. Urgensi penelitian ini adalah jika BPR mampu meningkatkan peran secara terstruktur dan masif dalam memberikan akses keuangan kepada sektor UMKM, maka sektor usaha mikro akan tumbuh berkembang sebagai kekuatan ekonomi alternatif, sehingga mampu memberi kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat. Keunikan penelitian ini, lebih fokus pada tema riset untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro (BPR) dan UMKM. Skema penelitian ini sesuai dengan riset unggulan Perguruan Tinggi yaitu : “Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi lembaga keuangan mikro dan UMKM”. Adapun road map penelitian tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Roadmap Penelitian

Tahun	Kegiatan	Indikator
2018	Pengembangan model peran stakeholder dalam pengelolaan sentra UMKM	Memberi landasan dasar untuk menentukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif
2019	Peran Kredit BPR bagi UMKM	Memberi landasan lanjutan untuk melanjutkan tema terkait peran BPR bagi UMKM
2020	Evaluasi Penerapan Tata Kelola bagi BPR	Memberi landasan lanjutan terkait evaluasi penerapan tata kelola bagi BPR
2021	Peningkatan Peran BPR	Memberi landasan lanjutan terkait peningkatan peran BPR bagi UMKM

Kajian yang strategis dalam memahami partisipasi pelaku UMKM pada kegiatan ekonomi disebut sebagai sumberdaya ekonomi. Pelaku ekonomi yang berakar dari nilai ekonomi kerakyatan adalah masyarakat desa (Mohamad Radzi, Mohd Nor and Mohezar Ali, 2017), namun pola manajemen dan pemberdayaan sektor ini masih belum efektif (Rauch, Dallasaga and Matt, 2017) dalam mendorong potensi sumberdaya ekonomi yang memadai, sehingga belum memberi kontribusi secara optimal (Cantonnet, Aldasoro and Iradi, 2019). Oleh sebab itu memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait model pemanfaatan sumberdaya ekonomi dalam pengelolaan sektor UMKM yang efektif. Segala sesuatu yang akan dilakukan harus melalui rencana, metode dan logika tetapi bukan dengan cara paksaan.

Proses untuk mendayagunakan dan mendistribusikan tugas, wewenang, dan sumber daya ekonomi di antara anggota organisasi, sehingga masing-masing anggota dapat memperoleh sumberdaya yang layak untuk mencapai sasaran organisasi disebut dengan optimasi (Sanchez Badini, Hajjar and Kozak, 2018). Sasaran dan waktu yang berbeda tentu memerlukan sumber daya yang berbeda (Trianni *et al.*, 2019), sehingga membutuhkan optimasi

sumberdaya yang tepat sesuai kebutuhan agar sasaran dapat berjalan efektif dan efisien. Sektor UMKM tetap eksis dan bertahan hingga sekarang, karena lebih mengandalkan pada kemandiriannya dalam akses sumberdaya. Hal ini sering tidak dipahami oleh para *stakeholder* dalam memandang sektor informal dengan benar (Xiang *et al.*, 2019). UMKM ibarat seperti dua sisi mata uang dimana di dalam terdapat pelaku mikro dan pelaku UMKM.

Potensi kekuatan ekonomi yang berakar pada kehidupan masyarakat masih dikuasai oleh pedesaan (Choudhury and Goswami, 2019). Sementara itu kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan akses keuangan pada sektor mikro masih belum merata terutama yang tersebar di wilayah pedesaan (Sanchez Badini, Hajjar and Kozak, 2018). Itu sebabnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan mikro seharusnya lebih optimal dalam membuka akses keuangan kepada sektor UMKM. BPR yang memiliki akses sampai pelosok desa akan menjadi semakin massif perannya jika secara terstruktur menjadi bagian strategis dari lembaga keuangan *corporate*. Dalam menjalankan usahanya, BPR juga memerlukan sumber dana pihak ketiga (Syariah *et al.*, 2013). (Syariah *et al.*, 2013) Sektor UMKM secara reguler dapat menaikkan aset didukung oleh pendanaan agar mampu menambah aktivitas usahanya.

Penelitian tentang peningkatan lembaga keuangan mikro (BPR) ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu. Penelitian tahun 2017 tentang talenta manajemen dan pandangan dinamis terhadap bakat UKM mengusulkan tentang kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi karakteristik bakat di UKM (Krishnan and Scullion, 2017). Selanjutnya dalam penelitian tahun 2018 tentang penilaian dampak pembiayaan mikro terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan bisnis menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro memainkan peran utama dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pemilik usaha kecil, bahkan dapat menumbuhkan budaya menabung (Xiang *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Kanake and Mahesh, 2018) di tahun 2019 tentang Perusahaan Keluarga, inovasi berkelanjutan dan pembiayaan keuangan dari UKM di Cina menunjukkan bahwa interaksi antara *family business* skala UKM di Cina

berpengaruh negatif signifikan terhadap inovasi berkelanjutan. Selanjutnya (Effiom and Edet, 2020) dalam penelitiannya tentang inovasi keuangan dan kinerja UKM menunjukkan bahwa inovasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada produktivitas UKM di Nigeria Adapun topik penelitian ini adalah tentang peningkatan peran lembaga keuangan mikro (BPR) dalam memberikan akses keuangan terhadap kinerja sektor UKM di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah stage of the art dari penelitian ini:

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena ingin menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan peningkatan peran BPR dan penguatan kinerja sektor UMKM. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok peneliti yaitu instrumen peneliti dari pelaku BPR/UMKM, sedangkan instrumen peneliti kedua adalah akademisi dalam hal ini dosen UKDC, yang berperan mendesain konsep penelitian, kerangka berpikir, penentuan obyek, pengumpulan data, nara sumber, analisis data dan perumusan model.

Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku BPR/UMKM yang memahami benar tentang peran BPR atas akses keuangan sektor UMKM. Dalam sampel tidak ditentukan jumlah orang tetapi sejauhmana orang tersebut mampu menjelaskan berbagai aspek terkait peran BPR dan kinerja sektor UMKM. Adapun variabel penelitian yang diamati adalah peran BPR dan akses keuangan di BPR.

Tahapan Penelitian yang dilakukan:

1. **Identifikasi peran lembaga keuangan mikro:** melakukan observasi dan interview kepada 5 pengelola keuangan mikro (BPR) sebagai responden yang tersebar di Sidoarjo untuk menemukan variabel dan indikator yang relevan untuk menjelaskan peran lembaga keuangan mikro dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro (UMKM).
2. **Analisis struktur organisasi BPR:** melakukan analisis lebih mendalam terhadap 5 BPR di Sidoarjo untuk memahami peran lembaga dalam memberi akses keuangan kepada pelaku usaha mikro/UMKM
3. **Analisis prosedur pemberian akses**

keuangan: melakukan analisis lebih mendalam terhadap 5 BPR untuk memahami berbagai sistem dan prosedur lembaga keuangan mikro dalam memberi akses keuangan kepada pelaku usaha mikro/UMKM

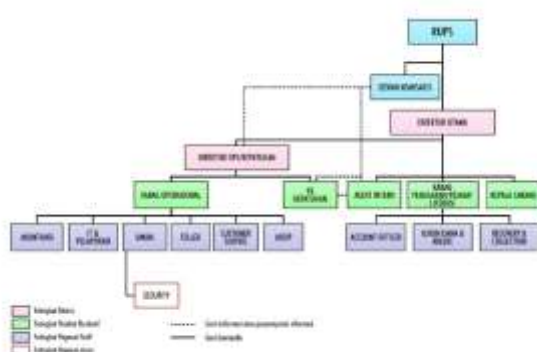
4. **Analisis produk jasa BPR:** melakukan analisis lebih mendalam terhadap 5 BPR untuk memahami secara rinci terkait produk jasa yang telah ditawarkan oleh BPR dalam memberi akses keuangan kepada pelaku usaha mikro/UMKM
5. **Rekonstruksi peran BPR:** merekonstruksi berbagai peran BPR untuk meningkatkan peran BPR tersebut dalam memberikan akses keuangan kepada sektor UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Porong, Taman, Sedati serta di kota Sidoarjo sendiri. Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa BPR ditemukan bahwa BPR sangat berperan khususnya di masa Pandemi ini terutama dalam memberikan dana bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan hidup. BPR sangat berperan terutama dalam memberikan kredit modal kerja serta membantu dalam pengaturan keuangan. BPR sangat berperan dalam memberi akses keuangan kepada pelaku usaha mikro (UMKM).

Adapun struktur organisasi BPR semuanya standar mengikuti ketentuan dari OJK, seperti pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3: Struktur Organisasi

Adapun ketentuan terkait jumlah anggota dewan direksi disyaratkan ada 2 orang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Untuk jumlah

Dewan Komisaris juga ada 2 orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris. Mengenai pertanggungjawaban setiap bagian sudah dituangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebelum menjabat, mereka harus mengikuti uji kompetensi berupa sertifikasi, serta fit and proper test dari OJK.

Produk jasa yang diberikan oleh BPR kepada pelaku UMKM selaku sektor mikro, antara lain kredit, tabungan serta deposito. Jenis kredit yang diberikan antara lain Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif. Yang dimaksud kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk menambah modal kerja. BPR yang ada di kota Sidoarjo juga menyediakan Kredit Investasi, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian lahan atau tanah dan bangunan. Di samping itu ada juga Kredit Sertifikat Massal Swadaya yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk biaya pengurusan peningkatan hak draft Letter Credit atau Petok D menjadi sertifikat.

Berkaitan dengan prosedur kredit kepada sektor mikro, semua BPR sama prosedurnya antara lain: adanya pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan. Kemudian pihak BPR akan melakukan evaluasi terkait dokumen tersebut serta melakukan survey lapangan. Hasil survey disampaikan kepada Komite untuk diminta pertimbangan sert keputusan persetujuan pinjaman yang diajukan. Hasil keputusan disampaikan kepada calon debitur. Khusus untuk Kredit Modal Kerja memakai survey kepada usaha calon debitur serta analisa terhadap kemampuan bayar nasabah. Sedangkan Kredit Konsumtif diprioritaskan kepada karyawan swasta atau buruh pabrik. Adapun untuk kredit konsumtif, memakai analisa berupa besaran gaji calon debitur di tempat kerjanya. Calon debitur yang menerima pemberian kredit, usia maksimal adalah 55 tahun, dengan pertimbangan faktor risiko. Jika pemberian kredit diberikan kepada calon debitur berusia di atas 55 tahun akan mempunyai risiko yang tinggi bagi BPR tersebut. Kendala yang dihadapi BPR terkait Kredit Modal Kerja antara lain: angsuran nasabah yang menunggak karena usaha yang sepi atau tidak berjalan lancar seperti saat pemberian kredit. Adapun kendala yang dihadapi BPR terkait Kredit Konsumtif antara lain adanya tunggakan angsuran dari nasabah yang

disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan swasta atau buruh pabrik, terutama di tengah kondisi Pandemi seperti ini. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak BPR wajib melakukan kunjungan lebih rutin untuk melakukan pembinaan, agar melalui word of mouth pelaku UMKM dapat merekomendasikan kinerja BPR tersebut kepada pelaku UMKM lainnya.

Sebelum memberikan kredit kepada calon nasabah, ada prosedur yang perlu dilalui yaitu analisa tentang Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral, atau biasa disingkat dengan istilah 5 C. Yang dimaksud Character disini adalah sifat ataupun karakter seseorang, dalam arti harus dapat dipercaya. Untuk menganalisa karakter memang memerlukan pengamatan atau observasi yang perlu waktu, karena meliputi: pemeriksaan latar belakang, tempat kerja, gaya hidup, keadaan keluarga maupun hobinya. Dari wawancara yang dilakukan, semua BPR mengutamakan Character ini. Prinsip ke dua adalah Capacity, yaitu analisa yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar kreditnya. Penilaian kapasitas ini membuat BPR mampu melihat kompetensi calon nasabah dalam mengelola usahanya. Prinsip ke tiga yaitu Capital atau modal. Analisa berkaitan dengan Capital ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang disajikan, baik Neraca maupun Laba Rugi. Dari laporan keuangan itu dapat diukur sisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Melalui perhitungan tersebut, BPR dapat melihat apakah modalnya sudah dipakai secara efektif atau belum. Prinsip ke empat yaitu Condition. Penilaian terkait kondisi, harus benar-benar ditinjau apakah usaha yang dibiayai sungguh-sungguh mempunyai prospek yang baik, sehingga dapat mencegah risiko kredit macet. Penilaian kondisi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, seperti saat Pandemi sekarang ini, kondisi sosial maupun kondisi politik yang ada sekarang serta prediksi di masa yang akan datang. Prinsip yang terakhir adalah Collateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan yang diberikan dapat bersifat fisik maupun non fisik. Dalam melakukan analisa, jaminan yang diberikan calon nasabah, hendaknya melebihi dari batas pengajuan kreditnya. Saat menerima jaminan, juga perlu diperiksa

keabsahan pemilik, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari (Kasmir, 2018). Aset yang dimiliki calon nasabah memang merupakan jaminan bagi BPR dalam memberikan kreditnya. Jika dikaitkan dengan kapasitas, lamanya usaha dalam beroperasi juga menentukan faktor pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang “Factors Determining Bank Loan Approval As Source of Financing For Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Jakarta”, yang menunjukkan bahwa lamanya usaha berdiri, total perputaran aset, jumlah agunan dan kriteria pelunasan pinjaman, berpengaruh positif dan signifikan terhadap persetujuan pinjaman Bank (Ekadjaja, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPR, rata-rata mereka mengutamakan prinsip pertama dan kedua, yaitu Character dan Capacity. Sekalipun jaminan juga menjadi pertimbangan tetapi bukan yang utama, melainkan karakter. Karakter memang tidak bisa dinilai langsung, biasanya melalui penggalian informasi atau observasi, serta informasi dari tetangga sekitar atau rekan bisnisnya. Di samping karakter, yang penting adalah Kapasitas yaitu kemampuan menghitung pembayaran utangnya.

Di samping prinsip 5 C, BPR dapat menggunakan analisis 7 P kredit, yaitu:

1. Personality merupakan penilaian nasabah dari segi kepribadiannya maupun tingkah laku sehari-hari. Penilaian ini juga meliputi emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah saat menghadapi masalah.
2. Party artinya melakukan klasifikasi nasabah menurut golongan atau kriteria tertentu, berdasarkan modal, karakter, serta loyalitasnya. Penilaian nasabah dengan kriteria tertentu, tentu akan mendapat perlakuan yang berbeda pula. Dalam melakukan penilaian ini, ada indikatornya, sehingga tidak bersifat bias, atau pribadi dari Analisis Kreditnya.
3. Purpose yaitu tujuan dari nasabah mengambil kredit. Hal ini perlu dianalisa termasuk jenis kredit yang akan diambil oleh calon nasabah tersebut. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam, ada yang untuk modal kerja, ada yang untuk konsumtif, ada yang untuk investasi.

4. Prospect yaitu penilaian yang dilakukan atas usaha nasabah di masa yang akan datang. Penilaian ini perlu dilakukan, karena jika usaha nasabah tersebut tidak mempunyai prospek di masa datang, tentunya akan merugikan pihak BPR dan juga nasabah itu sendiri.
5. Payment artinya penilaian dari sudut kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang sudah diambil atau dilihat dari sumber mana yang dipakai untuk membayar angsuran kreditnya. Semakin banyak sumber penghasilan dari nasabah, tentunya akan semakin baik. Jika salah satu usahanya rugi, dapat ditutup oleh usaha lainnya.
6. Profitability merupakan prinsip menganalisa kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. Profitabilitas diukur dari satu periode ke periode lainnya, apakah tetap sama atautkah mengalami peningkatan. Prinsip ini perlu dilakukan terutama dengan adanya Pandemi, usaha dari sektor UMKM dapat terkena imbasnya.
7. Protection bertujuan untuk mengukur bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan BPR mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh calon nasabah dapat berupa jaminan barang atau orang, atau asuransi (Kasmir, 2018).

Saat ini kinerja sektor UMKM cukup stabil karena sekalipun Pandemi, karena UMKM bersifat mikro, menghadapi perubahan ekonomi tidak terlalu berdampak terhadap kinerja UMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada 18 nasabah yang menikmati fasilitas keuangan dari BPR. Nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan sampai dua kali lipat antara lain usaha angkutan. Hal ini disebabkan adanya kontrak dengan pabrik susu, pabrik obat-obatan dan sembako. Untuk keberlangsungan usahanya, pihak Supplier juga menyediakan GPS untuk menjaga ketepatan waktu pengiriman. Ada juga 1 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 20% karena mempunyai mobil Box, bukan truk yang besar. Nasabah UMKM lain yang mengalami peningkatan sebesar 20% adalah penjual produk minyak goreng berupa minyak

CPO yang biasa dipakai untuk campuran pakan ternak. Dari 18 nasabah, ketika ditanya tentang pelayanan yang diberikan pihak BPR, mereka merasa sangat puas. Bagi mereka BPR memberi layanan yang sangat cepat, serta sangat membantu peningkatan usaha nasabah tersebut.

Adapun rincian perbandingan pendapatan UMKM selama tahun 2019 dan 2020:

Besarnya peningkatan pendapatan (dalam %)	Jumlah nasabah	Dalam %
100 %	1 orang	5,6 %
50 %	2 orang	11,1 %
28,6 %	1 orang	5,6 %
25 %	1 orang	5,6 %
20 %	2 orang	11,1 %
12,5 %	1 orang	5,6 %
11,7 %	1 orang	5,6 %
10 %	1 orang	5,6 %
8,2 %	1 orang	5,6 %
5,6 %	1 orang	5,6 %
5 %	1 orang	5 %
2,9 %	2 orang	11,1 %
0 % (Tetap)	2 orang	11,1 %
Jumlah Total	18 orang	100 %

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR sangat berperan dalam meningkatkan kinerja UMKM, terutama berkaitan dengan dana di masa Pandemi Covid-19 ini. Peran BPR sudah optimal dan mendukung sektor UMKM, namun tetap membutuhkan rekonstruksi peran BPR dalam memberikan akses keuangan kepada sektor UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses, menyalurkan pembiayaan, dan rasio keuangan (Rifa, 2017). Penelitian ini juga sejalan (Setiawan, 2021) tentang Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan pada UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja Bank Syariah. Penelitian ini berbeda dengan (Nugroho, Lucky dan Tamala, 2018) yang dilakukan kepada

UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran yang menunjukkan hasil bahwa peran Bank Syariah terhadap UMKM masih sangat rendah, karena Bank Syariah sulit ditemukan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar” menunjukkan bahwa kontribusi Perbankan Syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah masih belum optimal (Kara, 2013). Berbeda dengan studi yang menyoroti faktor perilaku yang mempengaruhi UKM menunjukkan bahwa niat untuk mengambil pinjaman bank komersial di Mesir masih sangat rendah karena adanya perspektif negatif terhadap kualitas layanan pemberi pinjaman (Tolba, Seoudi and Fahmy, 2014).

Agar dapat lebih meningkatkan peran BPR, maka rekonstruksi peran BPR yang diusulkan peneliti antara lain pendampingan kepada pelaku UMKM berkaitan dengan inovasi pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi bisa berupa pelatihan penggunaan Instagram, promosi melalui Web, pembuatan promosi di Whatsapp, dan lain sebagainya. BPR bukan hanya mengejar penghasilan berupa kredit yang dicairkan, tetapi diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka. Pendampingan yang diberikan bisa juga berupa strategi menciptakan produk yang berbeda dan khas agar mempunyai keunggulan yang komparatif (*comparative advantage*), seperti penelitian yang dilakukan di Temanggung (Ana and Imam, 2013). Di samping itu, BPR dapat memberikan pendampingan berupa pelatihan berhubungan dengan pelayanan kepada customer, sehingga pelaku UMKM dapat bersaing menghadapi pasar bebas. BPR juga dapat melakukan pendampingan *Capital Building* berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.

3.2. Pembahasan

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Memuat temuan spesifik atau unik dari hasil penelitian. Kemungkinan tindak lanjut kegiatan dapat juga disampaikan pada bagian ini [Times New Roman, 11, normal].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR sangat berperan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Kondisi Pandemi membuat pelaku UMKM memerlukan suntikan dana berupa keuangan agar dapat memperlancar usaha mereka, di situ BPR sangat memegang peranan penting. Sekalipun peran BPR sudah optimal dan mendukung sektor UMKM, tetap memerlukan rekonstruksi peran BPR, antara lain:

1. Pendampingan kepada pelaku UMKM berkaitan dengan inovasi pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang promosi produk pelaku UMKM.
2. Pendampingan berupa pelatihan terkait strategi menciptakan produk yang berbeda dan khas, agar memiliki keunggulan yang komparatif.
3. Pendampingan berupa pelatihan berhubungan dengan pelayanan kepada customer, sehingga pelaku UMKM dapat bersaing menghadapi pasar bebas.
4. Pendampingan *capital building* berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini berisi ucapan terima kasih, yang berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini [Times New Roman, 11, normal] (opsional/bilamana ada).

6. REFERENSI

- Ana, S. and Imam, H. (2013) ‘Peningkatan Eksistensi Umkm Melalui *Comparative Advantage* Dalam Rangka Menghadapi Mea 2015 Di Temanggung’, *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), pp. 110–119. doi: 10.15294/edaj.v2i2.1395.
- Cantonnet, M. L., Aldasoro, J. C. and Iradi, J. (2019) ‘New and emerging risks management in small and medium-sized Spanish enterprises’, *Safety Science*, 113(July 2018), pp. 257–263. doi: 10.1016/j.ssci.2018.11.032.
- Choudhury, M. and Goswami, C. (2019) ‘MSME Financing Gaps – Review of Literature for the Period 2005 To 2016’, *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 7(2), pp. 50–60. doi:

- 10.15640/jsbed.v7n2a5.
- Effiom, L. and Edet, S. E. (2020) 'Financial innovation and the performance of small and medium scale enterprises in Nigeria', *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 0(0), pp. 1–34. doi: 10.1080/08276331.2020.1779559.
- Ekadjaja, M. (2018) 'Factors Determining Bank Loan Approval As Source of Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (Msme) in Jakarta', *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), p. 226. doi: 10.24912/jmieb.v2i1.1563.
- Kanake, M. G. and Mahesh, D. R. (2018) 'the Impact Assesment of the Micro Finance To Financial Inclusion and Bisuness Growth: a Study of the Micro, Small and Medium Enterprises in Igembe South (Kenya)', *American Journal of Finance*, 3(1), p. 1. doi: 10.47672/ajf.323.
- Kara, M. (2013) 'KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR', *Jurnal Ilmu Sya'riah dan Hukum*, 47(1), p. 269.
- Kasmir, K. (2018) *Dasar-dasar Perbankan*. Revisi 201. Kota Depok: Rajagrafindo Persada.
- Krishnan, T. N. and Scullion, H. (2017) 'Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises', *Human Resource Management Review*, 27(3), pp. 431–441. doi: 10.1016/j.hrmr.2016.10.003.
- Mohamad Radzi, K., Mohd Nor, M. N. and Mohezar Ali, S. (2017) 'The impact of internal factors on small business success: A case of small enterprises under the felda scheme', *Asian Academy of Management Journal*, 22(1), pp. 27–55. doi: 10.21315/aamj2017.22.1.2.
- Nugroho, Lucky dan Tamala, D. (2018) 'Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Pean Bank Syariah', *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan*, 3(1), pp. 49–62. Available at: <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap/article/view/115>.
- Rauch, E., Dallasega, P. and Matt, D. T. (2017) 'Critical Factors for Introducing Lean Product Development to Small and Medium sized Enterprises in Italy', *Procedia CIRP*, 60, pp. 362–367. doi: 10.1016/j.procir.2017.01.031.
- Rifa, A. (2017) 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM', *Human Falah*, 4(2), p. 194.
- Sanchez Badini, O., Hajjar, R. and Kozak, R. (2018) 'Critical success factors for small and medium forest enterprises: A review', *Forest Policy and Economics*, 94(June), pp. 35–45. doi: 10.1016/j.forpol.2018.06.005.
- Setiawan, I. (2021) 'PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), pp. 263–278.
- Syariah, P. et al. (2013) 'Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013', *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), pp. 367–383. doi: 10.15294/edaj.v2i4.3206.
- Tolba, A., Seoudi, I. and Fahmy, K. (2014) 'Factors influencing intentions of Egyptian MSME owners in taking commercial bank loans', *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 27(6), pp. 497–518. doi: 10.1080/08276331.2015.1102478.
- Trianni, A. et al. (2019) 'Measuring industrial sustainability performance: Empirical evidence from Italian and German manufacturing small and medium enterprises', *Journal of Cleaner Production*, 229, pp. 1355–1376. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.076.
- Valeriani, D. and Putri, A. K. (2020) 'Comparison Development of MSME Credit in The Sumatera Region', *Economics Development Analysis Journal*, 9(3), pp. 293–305. doi: 10.15294/edaj.v9i3.38656.
- Xiang, D. et al. (2019) 'Family firms, sustainable innovation and financing cost: Evidence from Chinese hi-tech small and medium-sized enterprises', *Technological Forecasting and Social Change*, 144(February), pp. 499–511. doi: 10.1016/j.techfore.2018.02.021